

STRATEGI DINAS KOPERASI, UMKM, & TENAGA KERJA KOTA PALU DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO DI PASAR INPRES MANONDA PALU

***Syaakir Sofyan & Ahmad Arief**

Abstract:

This paper discusses "the strategy of cooperative service, UMKM, and labor force of Palu in empowering micro business in market of Inpres Manonda Palu". The purpose of this paper is to find out the strategic steps of Cooperative service and UMKM of Palu City in empowering micro business in market of Inpres Manonda Palu, The results of this study show the general picture of micro business in market of Inpres Manonda Palu is the number of business actors as many as 1040 traders are recorded on Market Office with the largest number of traders is mixture of merchants / agricultural products totally 205 trades. All the needs of society generally can be fulfilled in market of Inpres Manonda Palu. The dominant tribe is the Buginese tribe. The strategic steps of cooperative service, UMKM, and labor force of Palu City have been implemented through the planning, implementation and evaluation process based on the 5th Annual Plan. The steps that have been implemented are data collection, product marketing through e-commerce, socialization, formation of cooperatives, training, construction of partnership network.

Keywords: *UMKM, micro bussiness, market, labor force.*

A. Latar Belakang

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatnya jumlah barang dan jasa serta peluang kerja bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan seluruh dukungan sumber

daya yang ada dan merancang serta membangun ekonomi daerah.¹⁵³ Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mencakup usaha untuk memberdayakan sehingga masyarakat mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi.

Peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi adalah pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Posisi penting ini sejak dilanda

¹⁵³Pujiono, Akselerasi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Pendidikan, *Proceeding Seminar Nasional Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas*, t.th., h. 320.

krisis belum semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi belum optimal.¹⁵⁴

Pemilihan usaha mikro sebagai obyek kajian sebab UMKM menjadi salah satu pion ekonomi yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Dampak krisis mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah, utamanya beberapa usaha-usaha besar mengalami keterpurukan.¹⁵⁵ Adapun usaha mikro menjadi fokus sentral dalam penelitian ini karena usaha mikro mampu menduduki posisi pertama yang menyumbangkan Rp. 5.440 triliun (atas dasar harga berlaku) atau 42,4% terhadap PDB pada tahun 2013 dan mampu menyerap tenaga kerja yang paling besar di antara usaha lainnya hingga mencapai 114,14 juta orang pada tahun 2014.¹⁵⁶ Selain itu, produktivitas tenaga kerja juga mengalami peningkatan dari tahun 2006-2009 hingga 2010-2013.¹⁵⁷

Pemilihan pelaku usaha mikro di Pasar Inpres Manonda Palu dikarenakan pasar tersebut berada pada posisi strategis sebagai pusat transaksi ekonomi usaha mikro terpadat di Kota Palu dan berada di Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, data yang diperoleh dari

¹⁵⁴Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, "Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional" (Makalah yang disajikan pada Rapat Kerja Nasional I GARANSI di Grand Hyatt Regency Hotel, Surabaya, 7 Januari 2005), h. 3.

¹⁵⁵Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan", Jurnal JKMP Vol. 2, No. 2 (2014), h. 103.

¹⁵⁶Bank Indonesia, "Pemetaan dan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan Pasca MEA 2025" (Jakarta: Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, 2016), h. 9.

¹⁵⁷*Ibid.*, h. 11.

BPS Sulawesi Tengah ditemukan bahwa jumlah perusahaan untuk mikro mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Perusahaan Mikro Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi

Provinsi	2013	2014	2015
Sulawesi Utara	37.091	35.527	39.431
Sulawesi Tengah	30.247	38.511	20.745
Sulawesi Selatan	94.537	100.526	112.896
Sulawesi Tenggara	57.180	68.711	46.084
Gorontalo	20.934	22.610	12.458
Sulawesi Barat	26.028	27.888	11.123

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, Terjadi penurunan jumlah perusahaan mikro pada tahun 2015 sebesar 46, 13%. Hal ini menjadi sorotan besar mengingat pentingnya usaha mikro dan kontribusinya terhadap pembangunan. Mencermati fenomena tersebut maka tulisan ini akan menjawab Langkah-langkah **Strategis Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu dalam memberdayakan usaha mikro di Pasar Inpres Manonda Palu serta hambatan yang dihadapi oleh Dinas tersebut dalam pemberdayaan usaha mikro?**

B. Pembahasan

1. Gambaran Usaha Mikro di Pasar Inpres Manonda Palu

Usaha mikro merupakan usaha yang paling diminati oleh masyarakat karena tidak membutuhkan modal yang besar dalam usahanya. Berbagai keunggulan yang dimiliki oleh usaha mikro

mampu menopang perekonomian khususnya untuk kalangan ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha mikro memiliki pengaruh penting dalam perekonomian. Wadah tempat bertemunya pelaku usaha dengan konsumen disebut pasar.

Pasar Inpres Manonda merupakan pasar tersibuk di Kota Palu dengan luas lahan 49.886 m² dan luas bangunan sebesar 17.914 m² yang mampu menopang berbagai kebutuhan masyarakat. Pasar Inpres Manonda telah menjalankan peran fungsinya dalam perekonomian. Diantaranya adalah bagi produsen yaitu membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan dapat pula digunakan sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi. Selain itu, produsen juga dapat memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan untuk keperluan proses produksi.

Secara umum, untuk menggambarkan pelaku usaha mikro di Pasar Inpres Manonda Kota Palu memiliki berbagai hambatan karena tidak adanya data yang jelas dan terbaru terkait jumlah pelaku usaha dan spesifikasinya. Hal ini karena kebanyakan dari pelaku usaha melaksanakan usahanya pada waktu tertentu atau bertepatan dengan hari-hari besar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pasar, maka jumlah pelaku usaha di Pasar Inpres Manonda adalah:

Tabel 4.3

Jumlah Pelaku Usaha Mikro Berdasarkan Data yang Diperoleh dari Kantor Pasar Manonda Tahun 2017

No	Kategori Pedagang	Jumlah
1	Penjual sayur	119 pedagang

2	Penjual campuran/hasil bumi	205 pedagang
3	Penjual kain	189 pedagang
4	Penjual kosmetik, aksesoris, dan emas	73 pedagang
5	Penjual makanan dan minuman	79 pedagang
6	Penjual buah-buahan	57 pedagang
7	Penjual pecah belaj	24 pedagang
8	Penjual ikan basah dan kering	118 pedagang
9	Penjual usaha lainnya	176 pedagang
Jumlah		1.040 pedagang

Sumber: Kantor Pasar Manonda, 2017.

Berdasarkan data di atas, terlihat jumlah pedagang di Pasar Inpres Manonda Palu sebanyak 1.040 pedagang yang terdiri dari 9 jenis kategori pedagang. Meski demikian, perkembangan data dari tahun ke tahun jumlah pelaku usaha tidak ada, sehingga tidak ada perbandingan perkembangan jumlah pelaku usaha dari tahun ke tahun.

Selain itu, data di atas yang diperoleh Kantor Pasar berdasarkan rekapitulasi jumlah pelaku usaha yang membayar retribusi, sehingga data di atas dapat dikatakan belum menggambarkan pelaku usaha secara konkret karena masih banyak pelaku usaha yang tidak membayar retribusi.

Menurut Asput selaku Kepala Pasar Inpres Manonda:

Rekapitulasi jumlah pelaku usaha mikro adalah pelaku usaha yang membayar retribusi kepada Kantor Pasar. Pelaku usaha yang menempati fasilitas pasar yang digunakan untuk berdagang dikenakan retribusi. Adanya pembayaran retribusi memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menempati kios, los, ruko,

tempat PKL, sehingga tidak akan terjadi pengambilan lokasi.¹⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka bagi pelaku usaha yang membayar retribusi akan mendapatkan hak untuk menempati lokasi yang telah disediakan. Ditambahkan pula oleh Asput bahwa terkadang terdapat pula pelaku usaha yang tidak membayar retribusi dan menempati lokasi yang telah disediakan dan hal ini terkadang dapat memicu konflik antar pedagang karena tidak terdapatnya kejelasan hak untuk penggunaan lokasi. Hal yang seperti ini terkadang tidak dapat di data sebagai pelaku usaha mikro karena sering berpindah tempat. Selain itu, pelaku usaha mikro yang berada di pinggir jalan tidak dapat di data sebagai pelaku usaha tetap, karena terkadang pelaku usaha tersebut sering berpindah tempat.¹⁵⁹

Berdasarkan hasil observasi rekapitulasi pelaku usaha mikro di Pasar Inpres Manonda menemui hambatan yang besar untuk memperoleh data sesungguhnya. Hal ini dikarenakan selain yang telah dikemukakan di atas, ternyata adanya kemudahan dan kebebasan masuk keluar pasar untuk aktifitas jual beli. Hal ini pun dapat dikatakan sebagai hal yang wajar, karena Pasar Inpres Manonda merupakan pasar dimana penjual memiliki kesempatan yang sama sehingga ketika terdapat ruang kosong yang dianggap dapat ditempati untuk berusaha maka akan ditempati oleh masyarakat/penjual untuk berdagang.

Selain itu, pelaku usaha di Pasar Inpres Manonda sebahagian besar didominasi oleh suku Bugis yang berdasarkan hasil observasi kebanyakan pelaku usaha menggunakan bahasa Bugis untuk

¹⁵⁸Asput, Kepala Pasar Inpres Manonda, *Wawancara*, Palu, 31 Agustus 2017.

¹⁵⁹*Ibid.*

berkomunikasi, kemudian suku Kaili disusul dengan pelaku usaha dari Jawa dan lainnya. Meningkatnya arus pendatang ke Kota Palu khususnya dari wilayah Selatan (suku Bugis) mulai membentuk pusat konsentrasi pemukiman di sekitar Pasar Inpres Manonda.

Pelaku usaha suku Bugis sebahagian besar mendominasi barang-barang yang dijual di pasar, diantaranya barang-barang pabrikan seperti kain, peralatan rumah tangga, dan sepatu/sandal, sayur mayur, buah-buahan, perhiasan, barang-barang campuran, rempah-rempah, dan lainnya.

Demi melengkapi jumlah pelaku usaha yang ada di Pasar Inpres Manonda, peneliti berupaya pula mencari data dan informasi di kelurahan Kamonji dan Kelurahan Balaroa demi kevalidan data yang diperoleh dan menggambarkan pelaku usaha mikro. Kedua kelurahan tersebut ditampilkan karena posisi Pasar Inpres Manonda merupakan persilangan dari kedua kelurahan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh di Kelurahan Balaroa, maka terdapat 9 (sembilan) pelaku usaha mikro di Pasar Inpres Manonda Palu, yaitu:

Tabel 4.4

Jumlah Pelaku Usaha Mikro Pasar Inpres Manonda yang Telah Mendapatkan IUMK Berdasarkan Data Kelurahan Balaroa Tahun 2017

No	Pemilik	Nama Usaha	Jenis Usaha	Tahun Pendirian	Modal	Penjualan
1	Mammi	B. Gor Wahyu	Bawang Goreng	2007	500.000	4.500.000
2	Abidin	Abidin	Bengkel Motor	2016	800.000	2.400.000
3	Fikri	Fikri Motor	Bengkel Motor	1998	4.500.000	4.000.000
4	Baharuddin	Andri Ms	Bengkel Motor	2009	1.000.000	2.400.000
5	Hacksan	Hacsan	Bengkel	2016	300.000	2.400.000

		Motor	Motor			
6	Sunarno	Sunarno	Bakso	2012	1.500.000	9.000.000
7	Anto	Anto	Salon	2016	10.000.000	6.000.000
8	Rasman	Ocha	Salon	2013	15.000.000	3.000.000
9	Ayu	Ayu	-	2015	20.000.000	4.800.000

Sumber: Kantor Lurah Balaroa, 2017

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa pelaku usaha yang terdaftar telah melakukan IUMK di Kelurahan Balaroa sebanyak 9 (sembilan) pelaku usaha mikro. Meski demikian, data ini tidak menjamin sebagai data valid yang menggambarkan realitas di lapangan, karena data ini hanya mampu mendata pelaku usaha mikro yang telah mendapatkan IUMK.

Adapun data yang diperoleh yang belum mengurus IUMK di Kantor Lurah Balaroa sebanyak 33 pelaku usaha. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.5

Jumlah Pelaku Usaha Mikro Pasar Inpres Manonda yang Belum Mengurus IUMK Berdasarkan Data Kelurahan Balaroa Tahun 2017

No	Jenis Usaha	Nama Usaha	Lokasi
1	Kios	Beras	Jalan Labu
2	Kios	Hidup Bersama	Jalan Labu
3	Kios	Fitria	Jalan Labu
4	Kios	Jual Beras	Jalan Labu
5	Kios	Fitria	Jalan Labu
6	Kios	Sinar Sulawesi	Jalan Labu
7	Kios	Anugrah	Jalan Labu
8	Kios	Mentari	Jalan Labu
9	Kios	Safira	Jalan Labu
10	Kios	Rianti	Jalan Labu
11	Kios	9 Kas	Jalan Labu

12	Kios	Fauzia	Jalan Labu
13	Kios	Misna	Jalan Labu
14	Kios	Hardi Irma	Jalan Labu
15	Kios	Hi.Hasna	Jalan Labu
16	Kios	Ardi	Jalan Labu
17	Kios	Suriani	Jalan Labu
18	Kios	Omg	Jalan Labu
19	Kios	Suriana	Jalan Labu
20	Kios	Hi.Subeda	Jalan Labu
21	Kios	Ita	Jalan Labu
22	Kios	Jual Beli beras	Jalan Labu
23	Toko	Indah 2	Jalan Labu
24	Toko	Hi.Alba	Jalan Labu
25	Toko	Sinar Bumi	Jalan Labu
26	Toko	Nurfaidah/Muliya	Jalan Labu
27	Toko	Pertanian	Jalan Labu
28	Toko	Buku Dina	Jalan Labu
29	Toko	Toko	Jalan Labu
30	Toko	Surabaya Plastik	Jalan Labu
31	Toko	Cancer Jaya	Jalan Labu
32	Toko	Maju	Jalan Labu
33	Penjahit	Ulum	Jalan Labu

Sumber: Kantor Lurah Balaroa, 2017

Berdasarkan data di atas, pelaku usaha yang belum mendapatkan IUMK sebanyak 33 pelaku usaha yang terdiri atas 22 berupa kios, 10 berupa toko, dan 1 penjahit. Data ini belum juga dapat menggambarkan data valid tentang keseluruhan pelaku usaha mikro yang terdapat di Kelurahan Balaroa. Selain itu, data di atas belum lengkap dikarenakan data untuk pelaku usaha yang belum memperoleh IUMK tidak selengkap data pelaku usaha yang telah memperoleh IUMK.

Adapun pelaku usaha yang mengurus di Kecamatan Kamonji

adalah mendapatkan beberapa hambatan karena proses penginputan data pelaku usaha yang mengurus IUMK masih memakai buku besar dan tidak ada *data base* berupa *file*. Hal ini menjadi kesulitan bagi peneliti sendiri karena data yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan.

Menurut Risni:

Selama ini kami hanya memiliki data pelaku usaha terdapat pada buku besar dan kami belum menginput data tersebut melalui komputer, sehingga ketika seseorang atau beberapa pihak yang membutuhkan terkait data tersebut maka hanya buku besar itulah yang kami hadirkan.¹⁶⁰

Tinjauan kedua berdasarkan penerbitan surat izin domisili usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan yang diperuntukkan kepada pelaku usaha yang berdomisili di luar Kelurahan Kamonji dan melakukan aktivitas dagang/usaha di Kelurahan Kamonji. Adapun jumlah pelaku usaha mikro yang mengurus surat izin domisili usaha sebanyak 203 pelaku usaha.

2. Langkah-langkah Strategis Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu dalam Memberdayakan Usaha Mikro di Pasar Inpres Manonda Palu

Pemberdayaan usaha merupakan bahagian penting dalam pengembangan usaha mikro baik dari sisi produksi dan pemasaran. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijahakn dan menerapkan langkah-langkan dalam mendorong pemberdayaan usaha. Pemberdayaan usaha berarti adanya peningkatan status pelaku usaha dari pelaku usaha mikro menjadi

¹⁶⁰Risni, Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kamonji, *Wawancara*, Palu, 5 September 2017.

pelaku usaha kecil.

Menurut Mursidin H. Yusuh, pemberdayaan usaha mikro di Pasar Inpres Manonda yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu belum dirasakan oleh seluruh pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masih terfokus pada pengembangan sumber daya lokal yang berbasis *home industry* dan pelaku usaha yang memiliki IUMK.¹⁶¹ Dengan demikian, pelaku usaha yang belum memperoleh IUMK dan bukan bahagian sumber daya lokal belum mampu menarik perhatian pemerintah.

Adapun langkah-langkah strategis yang telah dilakukan bagi pelaku usaha mikro di Pasar Inpres Manonda Kota Palu adalah:

1. Pendataan

Suatu kebijakan atau keputusan tidak akan terlepas dari informasi awal sebagai suatu pertimbangan. Sumber informasi biasanya berupa data yang memiliki keakuratan sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Banyak keputusan yang kurang tepat terkadang terjadi dikarenakan data yang dimiliki tidak akurat sehingga akan menimbulkan polemik.

Kegiatan pendataan merupakan proses awal yang sangat penting bagi Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu dalam memutuskan kebijakan dalam pemberdayaan UMKM. Hal ini diungkapkan oleh Maswati bahwa pendataan merupakan langkah penting untuk mengetahui fakta-fakta di lapangan yang akan menghasilkan informasi penting. Fakta dikumpulkan untuk menjadi data dan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan sehingga data-data yang diperoleh akurat kemudian diolah sehingga dapat diutarakan

¹⁶¹Mursidin H. Yusuf, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 25 Agustus 2017.

secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak mengalaminya sendiri.¹⁶² Hal senada diungkapkan pula oleh Mursidin H. Yusuf bahwa:

Dalam penentuan kebijakan, kami senantiasa melakukan pendataan sebagai langkah awal untuk memperoleh informasi awal. Data diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan sehingga data yang diperoleh menjadi akurat dan tepat. Kemudian diolah dan menghasilkan informasi awal keadaan sebenarnya di lapangan.¹⁶³

Hal senada pula diungkapkan oleh Syarifuddin bahwa pendataan adalah kegiatan yang sangat urgen karena tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi/fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu, pendataan akan terkait dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program yang melibatkan pelaku-pelaku usaha mikro dan jenis kegiatan yang diperlukan.¹⁶⁴

Henny Anggraini menambahkan pula:

Pendataan yang telah dilakukan akan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel yang terstruktur sehingga data dapat memberikan informasi secara jelas serta dapat memberikan perbandingan perkembangan pelaku usaha mikro dari tahun ke tahun.¹⁶⁵

Dalam penerapannya, Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu melakukan koordinasi dengan kelurahan. Hal ini didasarkan dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014

¹⁶²Maswati, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 25 Agustus 2017.

¹⁶³Mursidin H. Yusuf, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 25 Agustus 2017.

¹⁶⁴Syarifuddin, Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 29 Agustus 2017.

¹⁶⁵Henny Anggraini, Kepala Seksi Kemitraan UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 29 Agustus 2017.

tentang Perizininan Izin Usaha Mikro Kecil yang dapat dilakukan oleh kelurahan.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu terdapat 4.613 pelaku usaha yang tersebar di Kota Palu, akan tetapi jumlah tersebut belum mampu menggambarkan jumlah secara keseluruhan karena data yang diperoleh adalah data pelaku usaha yang telah mengurus Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Berikut ini tabel rekapitulasi data usaha UMKM di Kota Palu tahun 2017:

Tabel 4.6
Rekapitulasi Data Usaha UMKM Kota Palu Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha
1	Palu Barat	Baru	161
		Kamonji	316
		Siranindi	206
		Ujuna	209
		Balaroa	390
		Lere	551
2	Ulujadi	Buluri	84
		Donggala Kodi	80
		Kabonena	20
		Silac	-
		Watusampu	-
		Tipo	25
3	Palu Selatan	Tatura Utara	19
		Tatura Selatan	9
		Birobuli Utara	13
		Birobuli Selatan	8
		Petobo	10
4	Tatanga	Nunu	54
		Palupi	276

		Tavanjuka	53
		Pengawu	27
		Duyu	50
		Boyaoge	92
5	Palu Utara	Kayu Maleo Pajeko	56
		Kayumalue Ngapa	68
		Taipa	138
		Mambro	123
		Mamboro Barat	43
6	Tawaeli	Pantoloan	-
		Pantoloan Boya	134
		Baiya	152
		Lambara	17
		Panau	65
7	Mantikulore	Layana Indah	295
		Tondo	-
		Talise	270
		Tanamodindi	148
		Lasoani	226
		Poboya	80
		Kawatuna	61
		Talise Valangguni	18
8	Palu Timur	Lolu Selatan	33
		Lolu Utara	3
		Besusu Barat	10
		Besusu Tengah	20
		Besusu Timur	-
JUMLAH			4.613

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, 2017.

Berdasarkan tabel diatas, maka jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Palu sebesar 4.613 pelaku usaha. Data di atas merupakan data yang diperoleh oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu dari kelurahan-kelurahan yang terdapat di

Kota Palu. Meski demikian, data di atas masih dianggap kurang karena masih terdapat beberapa kelurahan yang belum memasukkan data pelaku usaha yaitu Kelurahan Silae, Kelurahan Watusampu, Kelurahan Pantoloan, dan Kelurahan Besusu Timur.

Menurut Syarifuddin, selama ini Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan untuk mendapatkan data pelaku usaha mikro. Hal ini dilakukan karena semenjak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil. Pelaksana Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Walikota. Pelaksana IUMK dapat didelegasikan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangan karakteristik wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Diberlakukannya Peraturan Presiden tersebut memberikan kemudahan dalam memperoleh data dengan keakuratan yang sangat tinggi dengan fakta berupa dokumen yang lengkap.¹⁶⁶

Pernyataan di atas menggambarkan pentingnya kegiatan pendataan dalam rangka mendapatkan data real di lapangan. Meski demikian, pelaksanaan pendataan ini memiliki hambatan-hambatan sehingga akan mempengaruhi keakuratan data dan informasi yang diperoleh.

2. Pemasaran Produk melalui E-Commerce

E-commerce (perniagaan elektronik) merupakan proses yang memungkinkan teknologi-teknologi berbasis situs internet yang memfasilitasi perniagaan/perdagangan. *E-commerce* memfasilitasi penggunaan dan implementasi proses baru bisnis. Hal ini mencakup

¹⁶⁶Syarifuddin, Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 29 Agustus 2017.

pelaksanaan bisnis secara elektronik melintasi spektrum hubungan-hubungan antar perusahaan-perusahaan.¹⁶⁷ Mengingat bahwa *e-commerce* dapat membantu UKM mengatasi perbabagi permasalahan usaha mikro, maka adopsi *e-commerce* menjadi hal yang perlu dilakukan. *E-commerce* memungkinkan UKM untuk memasarkan dan memproduksi produknya karena dengan media tersebut daya jangkau menjadi luas dan murah karena *web* adalah media informasi yang dapat diakses dari mana saja selama jaringan internet tersedia.

Keuntungan bagi pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan *e-commerce* adalah 1) memperpendek jarak antara perusahaan dapat lebih mendekatkan diri dengan konsumen; 2) perluasan pasar semakin luas dan tidak terbatas oleh area geografis dimanapun perusahaan berada; 3) perluasan jaringan mitra bisnis karena mitra kerja sangat penting untuk konsultasi dan kerjasama baik teknis maupun non-teknis; 4) Efisiensi dan memangkas biaya operasional. Perusahaan yang berdagang secara eletronik tidak membutuhkan kantor dan toko yang besar, menghemat kertas yang digunakan untku transaksi, periklanan, serta pencatatan. Selain itu, perdagangan elektronik juga sangat efisien dari sudut waktu yang digunakan. Pencarian informasi produk dan transaksi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu telah berupaya menggalakkan sosialisasi terkait *e-commerce*. Menurut Henny Anggraini:

Dewasa ini tuntutan terhadap penguasaan teknologi sangat diperlukan, karena dengan teknologi manusia dapat menjangkau informasi hingga seluruh dunia. Pemanfaatan teknologi dalam

¹⁶⁷Lihat: Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra InsaniaPress bekerjasama dengan MSI MUI, 2004), h. 15.

pemberdayaan usaha mikro telah dilakukan dan telah dicanangkan oleh pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro di Indonesia. Pemerintah mencanangkan Indonesia menjadi pemain *e-commerce* terbesar di ASEAN beberapa tahun ke depan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan kemudahan pendanaan dan perpajakan.¹⁶⁸

Ditambahkan pula oleh Mursidin H. Yusuf bahwa pemerintah saat ini telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019. Lahirnya Perpres tersebut memberikan penguatan kepada UMKM agar dapat memasarkan produknya ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu hadir sebagai pihak yang menjembatani agar pelaku usaha dapat memasarkan produknya melalui *e-commerce*. Hal ini merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa Pemerintah Daerah dan perangkat daerah bertanggung jawab dalam menumbuhkan iklim usaha yang berkaitan dengan promosi dagang.¹⁶⁹

Terkait pernyataan di atas, maka Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu berupaya semaksimal mungkin dalam memberdayakan usaha mikro dengan memanfaatkan teknologi serta merespon kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, hampir seluruh lapisan masyarakat telah banyak menggunakan teknologi untuk memudahkan aktivitas sehari-hari.

3. Sosialisasi

¹⁶⁸Henny Anggraini, Kepala Seksi Kemitraan UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 29 Agustus 2017.

¹⁶⁹Mursidin H. Yusuf, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 25 Agustus 2017.

Sosialisasi merupakan suatu proses dimana seseorang melakukan internalisasi konsep, nilai-nilai, ide atau gagasan kepada orang lain dalam suatu kelompok atau institusi sosial sehingga memunculkan partisipasi (keikutsertaan) di dalam kelompok atau institusi tersebut. Sosialisasi dilaksanakan bila beberapa anggota masyarakat/kelompok belum memahami dan menyadari pentingnya suatu ide/gagasan sehingga masyarakat yang tidak melalui proses sosialisasi akan mengalami kesulitan dalam berusaha atau menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Terkait dengan pemberdayaan usaha mikro, maka kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan penting dalam memberikan informasi-informasi terbaru terkait perkembangan dunia usaha utamanya terkait kebijakan-kebijakan yang baru ditetapkan. Selain itu, terkait pula dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk diimplementasikan dalam dunia usaha mikro.

Salah satu upaya dalam pemberdayaan usaha mikro adalah sosialisasi tentang permodalan bagi pelaku usaha mikro. Menurut Mursidin H. Yusuf:

Upaya yang akan kami lakukan dalam waktu dekat adalah sosialisasi tentang pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro di Kota Palu. Hal ini sangat penting karena usaha memiliki keterkaitan dengan ketersediaan modal. Selama ini, pelaku usaha mikro memiliki keterbatasan dalam memperoleh modal dari lembaga keuangan, sehingga selaku pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan usaha mikro maka kami menjembatani para pelaku usaha dengan lembaga keuangan”.¹⁷⁰

Sosialisasi tentang permodalan penting untuk dilaksanakan

¹⁷⁰Mursidin H. Yusuf, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 25 Agustus 2017.

karena perkembangan suatu usaha juga berkaitan erat dengan penambahan modal. Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis, namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan.

Hal di atas menunjukkan kontribusi Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu dalam pemberdayaan usaha mikro. Sosialisasi adalah salah satu upaya dalam mentransferkan gagasan serta informasi agar dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan pelaku usaha.

4. Pembentukan Koperasi

Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk dipertahankan, koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai suatu cara untuk memecahkan berbagai masalah atau persoalan yang dihadapi oleh masing-masing masyarakat khususnya untuk kalangan ekonomi yang lemah.

Kontribusi koperasi dalam pengembangan UMKM di Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah agar pengusaha UMKM dapat melakukan pinjaman kredit dari koperasi dalam mengembangkan usahanya. Peran koperasi dalam pengembangan UMKM adalah sebagai penyedia modal dalam kegiatan UMKM. Sejauh ini, faktor kurangnya perkembangan usaha mikro yang ditinjau dari berbagai sudut pandang adalah kurang modal.

Menurut Maswati, koperasi merupakan salah satu lembaga perekonomian yang ruang lingkupnya dikhususkan kepada masyarakat ekonomi kecil dan menengah. Koperasi memiliki slogan “Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia”. Makna dari istilah ini adalah koperasi sebagai pilar atau penyangga utama perekonomian. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Keberadaannya diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan sistem perekonomian nasional.¹⁷¹

Terkait dengan program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu adalah menghidupkan kembali Koperasi Pasar Inpres Manonda Palu. Menurut Maswati:

Program yang akan dilakukan oleh Bagian Koperasi Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu adalah mengaktifkan kembali koperasi di Pasar Inpres Manonda Palu. Selama ini koperasi pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan dikelola secara pribadi dan beralih menjadi tengkulak.¹⁷²

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Walikota Palu telah memerintahkan untuk membuka satu koperasi di Pasar Inpres Manonda dan Pasar Masomba. Padahal menurut Anjekris, dahulu setiap pasar masing-masing memiliki satu koperasi, akan tetapi saat ini hampir sudah tidak aktif dan telah beralih menjadi tengkulak dengan suku bunga yang dibebankan kepada masyarakat sangat tinggi.¹⁷³

¹⁷¹Maswati, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 25 Agustus 2017.

¹⁷²Hery Susianto, Kepala Seksi Pengawas dan Penilaian Koperasi, Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 25 Agustus 2017

¹⁷³Anjekris, “Pasar Masomba dan Manonda, Walikota Instruksikan Kadis Buka Koperasi Baru”, *Sulteng Raya*, 7 Februari 2017,

Menanggapi hal di atas, menurut Hery Susianto saat ini perkembangan koperasi kurang mendapat perhatian karena koperasi menunjukkan kinerja yang kurang dan citra yang lebih baik dari sebelumnya. Situasi ini merupakan salah satu bukti bahwa komitmen pemerintah masih kurang dalam pembangunan dan pengembangan koperasi. Pembangunan adalah proses yang harus berkelanjutan dan tersistem.¹⁷⁴

5. Pelatihan

Pelatihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Pelatihan membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya, guna meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan organisasi dalam usaha mencapai kinerja yang baik.

Senada dengan pengertian pelatihan di atas, Pemerintah dalam hal ini menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional pada Pasal 1 menyatakan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan atau pekerjaan.¹⁷⁵

Mursidin menyatakan bahwa dalam usaha mikro diperlukan banyak pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan para pengusaha

<http://sultengraya.com/2017/02/07/pasar-masomba-dan-manonda-walikota-instruksikan-kadis-buka-koperasi-baru/> (30 Agustus 2017).

¹⁷⁴Hery Susianto, Kepala Seksi Pengawas dan Penilaian Koperasi, Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 25 Agustus 2017

¹⁷⁵Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Bab I Pasal 1

mkro tentang usaha yang mereka tekuni, sehingga pengembangan usaha yang dilakukan dapat berhasil. Manfaat lainnya membantu para pengusaha untuk memperoleh pengetahuan teknologi baru, memahami cara bekerja secara efektif, dan memastikan adanya inovasi, kreatifitas dan pembelajaran yang berkelanjutan sehingga dapat membantu mempercepat perkembangan usaha.¹⁷⁶

Hal senada pula ditambahkan oleh Syarifuddin selaku Kepala Seksi Bidang Pengembangan Kelembagaan dan UMKM, pelatihan dimaksudkan untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja bagi para pengusaha mikro yang ditangani oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu¹⁷⁷

Adapun program pelatihan yang telah dilaksanakan dan direncanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, yaitu pelatihan enterpreneurship yang bekerja sama dengan Universitas Tadulako Palu yang tujuannya adalah agar para pengusaha mikro dapat dikelola dengan lebih kompeten dan mampu memanfaatkan peluang yang ada, serta memberikan motivasi kerja para pengusaha.¹⁷⁸

Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 sesuai dengan Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu adalah pelatihan manajemen pengelolaan koperasi yang ditargetkan akan diikuti 40 koperasi yang ada dibawah naungan dinas. Tujuan pelatihan tersebut adalah meningkatkan

¹⁷⁶Mursidin H. Yusuf, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 25 Agustus 2017.

¹⁷⁷Syarifuddin, Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 29 Agustus 2017.

¹⁷⁸Maswati, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 25 Agustus 2017.

pengetahuan pengelola koperasi dalam pengelolaan koperasi yang sesuai dengan praktik bisnis yang sehat, meningkatkan pengetahuan pengelola agar dapat menjalankan usaha koperasi dengan baik, meningkatkan kemampuan pengelola dalam menjalankan administrasi dengan tertib, meningkatkan keterampilan pengelola di bidang akuntansi koperasi sehingga dapat menegerjakan administrasi keuangan sesuai dengan sistem akuntansi koperasi, dan pengelola mampu membuat laporan pertanggungjawaban sehingga RAT dapat dilaksanakan tepat waktu.¹⁷⁹

6. Pembangunan Jaringan Kemitraan

Kemitraan secara umum dapat terjalin bila terdapat pihak yang merasakan adanya kelemahan implementasi bila sebuah pembangunan hanya menjadi *focus of interest* satu pihak saja. Dengan kata lain, kemitraan merupakan solusi yang tepat bagi pihak yang mencita-citakan adanya percepatan progres pembangunan. Kemitraan merupakan model pengelolaan sumber daya yang tepat bila terkait dengan barang publik.

Dalam kemitraan, seluruh elemen mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Sinergi antar elemen menjadi kunci dalam memainkan perannya masing-masing. Bangunan kemitraan harus didasarkan padahal-hal berikut: kesamaan perhatian (*common interest*) atau kepentingan, adanya sikap saling mempercayai dan saling menghormati, tujuan yang jelas dan terukur, dan kesediaan untukberkorban baik, waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain. Secara umum, prinsip-prinsip kemitraan adalah persamaan atau

¹⁷⁹Henny Anggraini, Kepala Seksi Kemitraan UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 29 Agustus 2017.

equality, keterbukaan atau transparency dan saling menguntungkan atau mutual benefit.

Kemitraan yang dihasilkan merupakan proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang bermitra dengan tujuan memperoleh nilai tambah. Hanya dengan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat dunia usaha, baik kecil maupun menengah akan mampu bersaing.

Menurut Henny Anggraini tujuan dari kemitraan adalah dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya aspek ekonomi adalah meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan memperluas lapangan kerja.¹⁸⁰

Ditambahkan pula oleh Mursidin H. Yusuf bahwa:

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Kemitraan usaha yang dilakukan untuk memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab social dengan pemberian pembinaan dan bimbingan yang terus-menerus, Pada pihak lain, tumbuh kembangnya kemitraan usaha akan diiringi dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan

¹⁸⁰Henny Anggraini, Kepala Seksi Kemitraan UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 29 Agustus 2017.

sosial.¹⁸¹

Selain hal di atas, usaha kecil terkadang memiliki keterbatasan pada teknologi, sehingga diharapkan mitra mampu memberikan bimbingan teknologi yang berkenaan dengan produksi dan pemasaran. Hal lainnya adalah usaha kecil mendapatkan pembenahan manajemen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemantapan organisasi.

Terkait dengan kemitraan pada bidang UMKM, PT. Pos Indonesia (Persero) menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendukung kegiatan pemasaran dan jaringan usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut I Wayan Dipta selaku Deputi Bidang produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM bahwa Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dalam meningkatkan pemasaran produk-produk UKM. Dengan hadirnya MoU tersebut, maka tidak hanya mempromosikan UMKM tetapi juga melakukan pendampingan terhadap UMKM di seluruh pelosok nusantara.¹⁸²

Sosialisasi terkait *e-commerce* pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu dilaksanakan melalui media sosial yaitu facebook. Hal ini dilakukan karena anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan *e-commerce* belum dianggarkan. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dengan PT. Pos Indonesia sebagai mitra

¹⁸¹Mursidin H. Yusuf, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 25 Agustus 2017.

¹⁸²I Wayan Dipta, "Pos Indonesia Dorong Pemasaran bagi UMKM", Metro TV News.com, 5 Juni 2016.
<http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/ob3p0EYk-pos-indonesia-dorong-pemasaran-bagi-umkm> (30 (Agustu 2017)

yang mendukung pemberdayaan UMKM. PT. Pos Indonesia memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro untuk memakai jasa Pos Indonesia dalam mendistribusikan dan memasarkan produk-produk usaha mikro.¹⁸³

PT Pos Indonesia menunjukkan eksistensinya dengan melakukan kerjasama pula dengan Shopee. Hal ini dilakukan dengan memberikan layanan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia dan edukasi bisnis untuk UKM agar dapat meminimalisir biaya bisnis dan memperluas jangkauan pasar guna membantu pertumbuhan bisnis UKM.¹⁸⁴ Selain itu, PT. Pos Indonesia bekerjasama pula dengan DHL Express Indonesia dalam rangka sinergi kekuatan jaringan untuk mendukung pengembangan pasar bagi UMKM.¹⁸⁵ Meski demikian, kinerja Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu harus memogramkan pelatihan dan sosialisasi *e-commerce* agar pelaku usaha dapat mengimplementasikan langsung.

C. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil kajian yang penulis lakukan di Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu dan Pasar Inpres

¹⁸³Henny Anggraini, Kepala Seksi Kemitraan UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 29 Agustus 2017.

¹⁸⁴Gilarsi W. Setiono, “Gandeng PT. Pos Indonesia, Shopee Berikan Layanan Gratis Ongkos Kirim”, 9 Mei 2017.
<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/09/180916526/gandeng.pt.pos.indonesia.shopee.berikan.layanan.gratis.ongkos.kirim> (30 Agustus 2017)

¹⁸⁵Gilarsi W. Setiono, “Pos Indonesia-DHL Berkomitmen Dukung UMKM”, 21 Januari 2016,
<http://bandung.bisnis.com/read/20160121/34231/548664/pos-indonesia-dhl-berkomitmen-dukung-umkm> (30 Agustus 2017)

Manonda Kota Palu, kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran umum usaha mikro di Pasar Inpres Manonda Palu adalah jumlah pelaku usaha sebanyak 1.040 pedagang yang terdata pada Kantor Pasar dengan jumlah pedagang terbanyak adalah pedagang campuran/hasil bumi yang berjumlah 205 pedagang. Seluruh kebutuhan masyarakat pada umumnya mampu dipenuhi di Pasar Inpres Manonda Palu. Adapun suku yang mendominasi adalah suku Bugis.
2. Adapun langkah-langkah strategis Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu adalah telah dilaksanakan dengan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang didasarkan pada Renstra 5 tahunan. Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan adalah pendataan, pemasaran produk melalui *e-commerce*, sosialisasi, pembentukan koperasi, pelatihan, pembangnan jaringan kemitraan.

Daftar Pustaka

- A.M.W. Pranaka dan Onny S. Prijono. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Alief Rakhman Setyanto, Bhimo Rizky Samodra, dan Yogi Pasca Pratama. *Kajian Strategi Pemberdayaan UMKM dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN (Studi Kasus Kampung Batik Laweyan*. Etikonomi, Vol. 14 No. 2, Oktober 2015.
- Amalia, Euis., *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Amirullah. *Manajemen Srategi (Teori-Konsep-Kinerja)*. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.
- Anjekris, "Pasar Masomba dan Manonda, Walkota Instruksikan Kadis Buka Koperasi Baru", Sulteng Raya, 7 Februari 2017, <http://sultengraya.com/2017/02/07/pasar-masomba-dan->

- manonda-walikota-instruksikan-kadis-buka-koperasi-baru/ (30 Agustus 2017).
- Anthony, Robert N, Govindarajan, dan Vijay. *Management Control System*. America: Mc Graw Hill, 2007.
- Anwar, M. Oos. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Anwar. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial melalui Pembelajaran Vocational Skill pada Keluarga Nelayan)*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perpektif Islam*. Yogyakarta: Magistra InsaniaPress bekerjasama dengan MSI MUI, 2004.
- Assauri, Sofyan. *Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep & Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Aulia, Rahman Rizka. *Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan UMKM dengan Penerapan SAK-EAP di Wilayah Kota Malang (Studi Kasus pada Keripik Tempe Sanan*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Bank Indonesia. *Pemetaan dan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan Pasca MEA 2025*. Jakarta: Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, 2016.
- Baylis, John. *Strategy in the Contemporary World*. United Kingdom: Oxford University Press, t.th.
- Blog Keuangan Daerah dan Kepegawaian, “Apa dan Mengapa Terjadi Perubahan APBD”, 25 September 2013. <https://deriirwan.wordpress.com/2013/09/25/apa-dan-mengapa-terjadi-perubahan-apbd/> (31 Agustus 2017).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2009.
- , *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet. IV; Jakarta: KKencana, 2010.
- Burhanuddin Abdullah, “Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia”, 4 Juni 2015, <http://www.ikopin.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/Peran-Koperasi-Dalam-Perekonomian-IIndonesia-Burhanuddin-Abdullah.pdf>, 5

September 2017.

- Dani Danuar Tri U. *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Jurusan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2013.
- Darwanto. *Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Inovasi dan Kreativitas (Strategi Penguatan Property Right terhadap Inovasi dan Kreativitas)*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vo. 20, No 2. 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Renstra Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Tahun 2017-2021*. Palu: Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, 2017.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*. Departemen Dalam Negeri, 2009.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Pola Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Ekonomi Pesantren*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Gilarsi W. Setiono, “Gandeng PT. Pos Indonesia, Shopee Berikan Layanan Gratis Ongkos Kirim”, 9 Mei 2017. <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/09/180916526/gandeng.pt.pos.indonesia.shopee.berikan.layanan.gratis.ongkos.kirim> (30 Agustus 2017)
- , “Pos Indonesia-DHL Berkomitmen Dukung UMKM”, 21 Januari 2016, <http://bandung.bisnis.com/read/20160121/34231/548664/pos-indonesia-dhl-berkomitmen-dukung-umkm> (30 Agustus 2017)
- Glueck William F dan Jauch F. *Manajemen dan Strategi Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Guntur, Effendi M. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan*. Jakarta: IKAPI, 2009.
- Heene, dkk. *Manajemen Strategik Keorgansiasian Publik*. Bandung:

- PT. Refika Aditama, 2010.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- I Wayan Dipta, "Pos Indonesia Dorong Pemasaran bagi UMKM", Metro TV News.com, 5 Juni 2016. <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/ob3p0EYk-pos-indonesia-dorong-pemasaran-bagi-umkm> (30 (Agustu 2017)
- Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Indiarti, Nurul. *Enterpreneurship dan Usaha Kecil Menengah di Indonesia*. Yogyakarta: Ardana Media, 2007.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, 2005.
- Kurniawan, Ferry Duwi dan Luluk Fauziah. *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal JKMP Vol. 2, No. 2, 2014.
- L.D.K.R. Ardianan, Brahmayanti, Subaedi, "Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 12, No. 1 Maret 2010, h. 43.
- M. Pardede, Pontas. *Manajemen Strategik & Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- News Metropol, "Walikota Menyambut Baik Kehadiran Patra Modern", *Metropol*, 29 Juni 2011. <http://newsmetropol.blogspot.co.id/2011/06/walikota-menyambut-baik-kehadiran-patra.html> (27 Agustus 2017)
- Nur Alfina Ulfa. *Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah dengan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja*. Jejaring Administrasi Publik, Th. V, Nomor 2, 2013.
- Nurwanita, *Perkembangan Usaha Makro, Kecil dan Menengah*

- (UMKM) di Pasar Manonda Palu. *Laporah Hasil Penelitian*. Palu: LP2M IAIN, 2015
- Parsons, Talcott. *The Social System*. England: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1991.
- Pattan, Abd. Kadir. *Pengembangan Model Perencanaan Komunikasi Antar Etnik sebagai Solusi atas Menguatnya Kesaran Etnosentrisme*. *Academia*, Vol 6, No. 1, 2014.
- Payne, M. *Social Work and Community Care*. London: McMillan, 1997.
- Pradnya Paramita Hapsari, Abdul Hakim, Saleh Soeaidy. *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah; Studi di Pemerintah Kota Batu*”*Wacana*, Vol 17 No. 2, 2014.
- Pujiono. *Akselerasi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Pendidikan, Proceeding Seminar Nasional Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas*, t.th.
- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak, 2000.
- Rizkiyani Nastiti dan Achmad Lutfi. *Analisis Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Presiden Tahun 2013*, *Jurnal Penelitian FISIP UI*, 2013.
- Rizky, Awalil. *Strategi Jitu Investasi di UMK; Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makro Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: BMT Permodalan, 2008.
- Robbins, Stephen P dan Mary Coulter. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Rudiantara, “Perpres E-Commerce Terbit, Begini Detailnya” *Viva*, 30 Agustus 2017, <http://www.viva.co.id/digital/945471-perpres-e-commerce-terbit-begini-detailnya>. 30 Agustus 2017.
- Sadan, Elisheva., *Empowerment and Community Planning*. Tel Aviv: Hakkibbutz Hameuchad Publishers, 1997.
- Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Soeharto, Saat. *Jurus Ampuh Mengatasi Kemiskinan*. Jakarta: PT.

Permodalan BMT, t.th..

Soetrisno, Loekman. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.

Steiner, George A., Miner, dan John B. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*. Jakarta: t.p., 1997.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2008.

-----, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009.

-----, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011.

Sukristono. *Perencanaan Strategis Bank*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1992.

Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.

Tambunan, Tulus T. H. *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009¹

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat dalam*

Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2013.

Winardi. *Entrepreneur dan Entrepreneurship*. Jakarta: Prenada Media.

*Dosen PNS Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu